

ABSTRAK

ABSTRAK. Paulus sutandra, nim 201404045, tahun 2016, KAJIAN HUKUM TERHADAP TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI.

Hukum kontrak merupakan suatu bentuk studi hukum hukum penjelasan dan detail mengupas tentang bentuk, syarat, juga makna kontrak dalam bisnis ekspor di bidang mineral dan contoh studi kasusnya, mengacu kepada aturan dan perundang-undangan, pasal dalam KUHPerdara yaitu pasal, 1320, pasal 1338 pasal 1313, dan juga menghubungkan istilah dan arti kontrak dalam Undang-Undang tentang Bahasa, Bendera di UU No. 24 Tahun 2009. Relevansinya antara pasal KUHPerdara pasal 1338 dan UU bahasa dan bendera tersebut, kata dan istilah bahasa hukum bisnis ekspor mineral yang berhubungan penggunaan istilah hukum pada umumnya dan kontrak perjanjian bisnis pada khususnya, bahwa setiap kontrak dan perjanjian di atur dalam KUHPerdara yang pada dasarnya kontrak dan perjanjian berpedoman pada asas konsensualisme, demikian juga dalam memilih bahasa yang di pergunakan dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk perjanjian yang di buat di dalam wilayah Negara Indonesia bahasa pengantar kontrak harus menggunakan Bahasa Indonesia.

The research is about disclosure the sources of information concern to, an analysis of correspondence contract business letter with legal interpretation of behavior is learned exports and imports disheveled such being as disparity correspondence business activity ,lack of substandard in written skill theory, Therefore author to conduct research on " LAW EXPLAIN INTERPRETING AND MEANING OF LAW CONTRACT EXPORT OF MINING CASE STUDY TRIBUNAL VERDICT NO. 48/PDT/2014/PT.DKI." In this study writter had formulated the problem how to use standard Indonesia English law words against torture and others, madatory it shall be Prote according to several matter pertaining of business mining export contracts. This study is a doctrinal–legal research by uses normative,formal juridical approach ,the result indicates that relationship between law words interpretation and law enforcement according to Indonesia ordinance of law as become source of rules of positive law. Some instrument for legal ruleas a justification reference with certain strengthens sanction ascendant for private law for business contract as well acknowledgment those who stereotype stigma against law. Based on the results of reseach has found that sociologically and distinguish behavior and implementation of private law to follow clause 1320, article 1339 there has been ward of torture need strong ofExplicit Law enforcement for lawlessness based on National and international law .

Keys words: interpreting, law of contract, business of law.